

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
KELAUTAN DAN PERIKANAN, SERTA PANGAN)**

---

- Tahun Sidang : 2015-2016  
Masa Persidangan : IV  
Rapat ke- : 06  
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Senin, 18 April 2016  
Waktu : 10.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)  
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
- Acara : - RUU Prioritas Tahun 2016;  
- Evaluasi Kinerja dan Serapan APBN Triwulan I Tahun 2016; dan  
- Tindak Lanjut Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2015-2016
- Ketua Rapat : Edhy Prabowo, MM., MBA.  
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo  
Hadir : A. 41 Anggota dari 51 Anggota Komisi IV DPR RI  
B. Hadir Pemerintah:
1. Dr.Ir. Siti Nurbaya, M.Sc. (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
  2. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal);
  3. Drs. Imam Hendargo Abu Ismoyo. M.A. (Inspektorat Jenderal);
  4. Prof.Dr.Ir. San Afri Awang, M.Sc. (Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan);
  5. Dr.Ir. Ida Bagus Putera Parthama, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari);
  6. Dr.Ir. Hilman Nugroho, M.P. (Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung);
  7. Dr.Ir. Tachir Fathoni, M.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem);
  8. Dr.Ir. Bambang Soepijanto, M.M. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia);
  9. DR.Ing.Ir. Hadi Daryanto, D.E.A. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan);
  10. Dr. Henry Bastaman, MES. (Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi)
  11. Drs. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan); dan
  12. Drs. M.R. Karliansyah, M.S. (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan)
- beserta jajarannya.

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka membahas RUU Prioritas Tahun 2016, Evaluasi Kinerja dan Serapan APBN Triwulan I Tahun 2016, dan Tindak Lanjut Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2015-2016, pada hari Senin tanggal 18 April 2016 dibuka pukul 10.00 WIB oleh Ketua Rapat Edhy Prabowo, MM., MBA. dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Pemerintah untuk membahas lebih lanjut Prolegnas bidang lingkungan hidup dan kehutanan menjadi RUU Prioritas Tahun 2016 yaitu RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik, dan menerima usulan Pemerintah atas rencana penggabungan kedua RUU dimaksud menjadi RUU tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem, serta RUU tentang Ratifikasi *Paris Agreement* terkait dengan Pengendalian Perubahan Iklim.
2. Komisi IV DPR RI menerima laporan atas realisasi APBN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 sampai dengan tanggal 8 April 2016 sebesar Rp713.580.639.255,- atau 11,67% dari Pagu APBN Tahun 2016 sebesar Rp6.116.839.792.000,-. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar lebih meningkatkan serapan pada APBN Tahun 2016.
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyelesaikan permasalahan perambahan kawasan hutan, pembakaran hutan, dan *illegal logging* serta menindak tegas pelakunya yang masih terjadi di beberapa wilayah di tanah air, dan meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum agar permasalahan dimaksud dapat segera diselesaikan.
4. Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menghentikan sementara reklamasi pantai Teluk Jakarta termasuk reklamasi pantai di wilayah Bekasi dan Tangerang, karena masih terdapat komplikasi regulasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan langkah-langkah pengawasan, investigasi, dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran izin lingkungan dan pembangunan reklamasi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan untuk menindaklanjuti hasil Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2015-2016 di Provinsi Jambi, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Barat, baik yang disampaikan secara langsung oleh masyarakat, para pemangku kepentingan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, maupun pemerintah daerah setempat, termasuk mendalami indikasi pelanggaran hukum PT. Susantri Permai, PT. Kapuas Maju Jaya, dan PT. Dwie Warna Karya yang merupakan temuan Kunjungan Kerja di Provinsi Kalimantan Tengah.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.50 WIB.

MENTERI  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

Ttd.

**DR. IR. SITI NURBAYA, M.SC.**

KOMISI IV DPR RI  
KETUA RAPAT,

Ttd.

**EDHY PRABOWO, MM., MBA.**  
A-335